ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR 2009-2013

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Fidha Rida Fadillah

115020107111059

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR 2009-2013

Yang disusun oleh :

Nama	:	
NIM	:	
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 November 2016.

Malang, 3 November 2016

Dosen Pembimbing

Eddy Suprapto, SE., ME.

NIP. 19580709 198603 1 002

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM DAN PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR 2009-2013

Fidha Rida Fadillah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email : ridafadil13@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel-variabel yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2009-2013, antara lain Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dari sejumlah publikasi instansi terkait yakni BPS Provinsi Jawa Timur. Spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel periode tahun 2009-2013 dengan rincian jumlah observasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, dan Tingkat Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan dan secara parsial dengan tingkat kepercayaan 95% menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan secara konsisten upah minimum dan menurunkan tingkat pengangguran.

Kata kunci : kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum, pengangguran

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, masalah kemiskinan selalu menjadi fokus utama permasalahan yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan pembangunan. Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan seminimal mungkin dan beberapa kebijakan tersebut memang menuai hasil positif.

Jawa Timur sebagai bagian wilayah tingkat provinsi di Indonesia memiliki jumlah penduduk 37.476.757 jiwa (BPS 2010) menjadikannya sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana provinsi dengan jumlah penduduk padat lainnya di Indonesia, Jawa Timur juga memiliki permasalahan dengan jumlah penduduk miskin yang relatif banyak.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan antara Provinsi Jawa Timur dan Indonesia

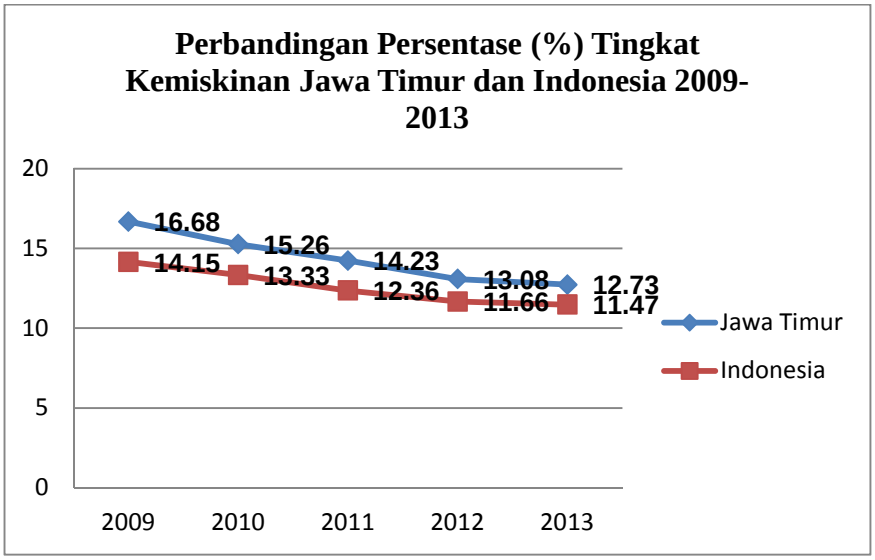

Sumber : BPS 2016

Dari gambar grafik 1.1 diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2009 penduduk miskin Jawa Timur mencapai 6,02 juta jiwa atau persentase mencapai 16,68 persen dan secara bertahap mengalami penurunan cukup signifikan hingga 4,89 juta jiwa atau sekitar 12,73 persen pada tahun .Namun, jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan secara nasional pada tahun 2009 sebesar 14,15 persen hingga pada 2013 mencapai 11,47 persen maka secara keseluruhan Jawa Timur memiliki tingkat persentase kemiskinan masih diatas rata rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah permasalahan serius yang masih belum diatasi secara optimal oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

Gambar 1.2 Grafik Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2009-2013

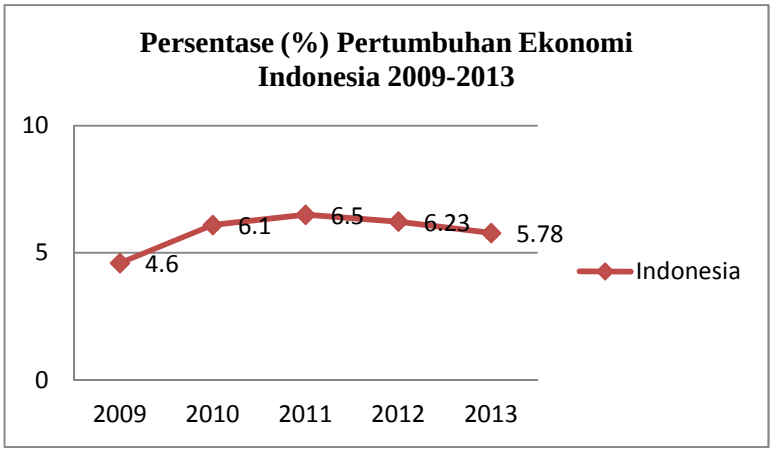

Sumber : BPS 2016

. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai salah satu indikator yang menggambarkan peningkatan standar hidup atau sebagai keberhasilan pembangunan. Pada gambar grafik 1.2 tergambar bahwa periode tahun 2009-2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu diatas 5 persen yang menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat bagus dan cenderung stabil.

Gambar 1.3 Grafik Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2009-2013

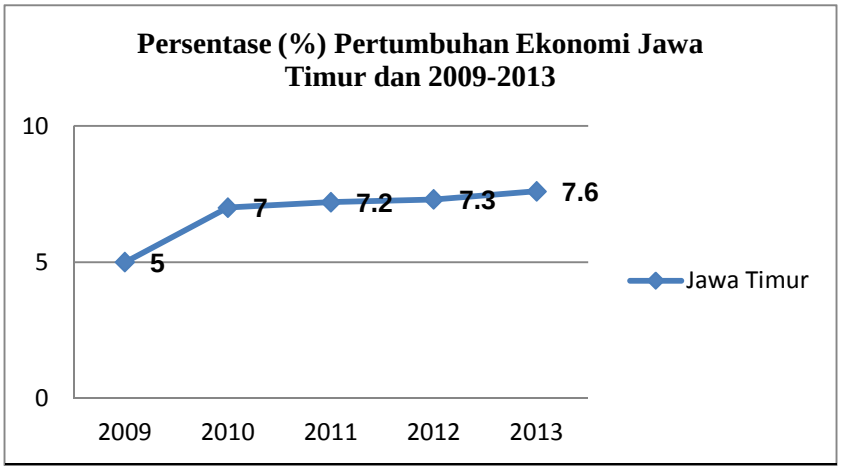

Sumber : BPS Jawa Timur 2016

Dari gambar grafik 1.3 diatas bisa diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur relatif meningkat secara signifikan pada periode tahun 2009 hingga 2013 dimana pada 2009 pasca krisis ekonomi global pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5 persen dan terus mengalami pertumbuhan postif hingga pada tahun 2013 telah naik signifikan sebesar 7,6 persen.

Dari fakta dan data pada gambar grafik 1.3 mengenai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menggambarkan betapa bagusnya kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang diatas pertumbuhan ekonomi nasional namun menjadi sebuah ironi ketika pada data lain menunjukkan mengenai persentase tingkat kemiskinan Jawa Timur justru melebihi rata rata nasional.

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Salah satu faktor penting yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Pendidikan adalah suatu investasi sumber daya manusia. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan di sektor sumber daya manusia khususnya pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan maka pemerintah telah membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun dan pada tahun 2016 ini tengah dipersiapkan menuju wajib belajar 12 tahun.

Secara umum, tingkat lama sekolah yang dienyam oleh penduduk Jawa Timur masih belum memenuhi harapan wajib belajar 9 tahun. Pada data BPS terakhir di tahun 2013, lama pendidikan sekolah yang dienyam oleh penduduk Jawa Timur masih berkisar di angka 7,53 tahun. Angka tersebut dapat mengindikasikan bahwa mayoritas rata rata lulusan sekolah formal di Provinsi Jawa Timur masih didominasi oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di suatu wilayah yang berkarakteristik banyak industri yang menyerap banyak tenaga kerja seperti Provinsi Jawa Timur, upah minimum juga merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh

terhadap kesejahteraan atau kemiskinan penduduk. Menurut Sumarsono (2003) mengatakan bahwa kebijakan upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan, gagasan upah minimum bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM).

Selain faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan upah minimum. Faktor tingkat pengangguran juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Timur dimana pada data BPS 2013 mencatat bahwa Tingkat Penganguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur relatif masih tinggi yakni sebesar 4,30 persen. Menurut Sukirno (2003), Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Provinsi Jawa Timur secara umum pada periode tahun 2009-2013 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan dan disertai pertumbuhan ekonomi yang meningkat signifikan, tapi rata-rata tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi dan diatas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. peneliti berusaha mengidentifikasi empat variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat permasalahan utama yang berupa tingkat kemiskinan.Ketiga variabel itu yakni pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum dan pengangguran.

B. Tinjauan Pustaka

Teori Kemiskinan

Di Indonesia,secara resmi Bappenas mengeluarkan definisi kemiskinan yakni sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan instansi BPS sendiri mendefinisikan kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Menurut BPS, orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.

Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2006) seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan. Amartya Sen juga berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah income semata melainkan terkait dengan kapabilitas kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses akses.baik terhadap pendidikan,kesehatan dan kesempatan kerja.

Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Adam Smith

Dalam Boediono (1981) garis besar pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan dua aspek utama yaitu pertama, pertumbuhan output dimana Smith melihat sistem suatu Negara terdiri dari 3 unsur pokok antara lain sumber sumber alam yang tersedia, sumber sumber manusiawi, stok barang kapital yang ada. Kedua, pertumbuhan penduduk dimana menurut Smith, penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah subsistensi, yaitu tingkat upah yang pas-pasan untuk seseorang agar bisa mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upah berada diatas tingkat substensi, maka orang orang akan kawin pada umur lebih muda, kematian anak anak berkurang dan jumlah kelahiran bertambah.

2. Teori Harrord-Domar

Teori ini didasarkan pada asumsi perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung (MPS=s) adalah konstan, proses produksi memiliki koefisien yang konstan, tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

3. Teori Pertumbuhan Solow-Swan

Teori Solow-Swan melihat bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat meciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mencampuri pasar. Hal ini membuat teori mereka dan pandangan para ahli lainnya yang sejalan dengan pemikiran mereka dinamakan teori Neoklasik. .

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Kuznet dalam Todaro (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur menurun.

Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 pengertian Pendidikan adalah sebuah usaha yang di lakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Undang – undang inilah yang menjadi dasar berdirinya proses pendidikan yang ada di Negara Indonesia. Pada UU No. 20 tahun 2003 pasal 13 juga dijelaskan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain.

Hubungan Pendidikan terhadap Kemiskinan

Todaro (2006) dalam Purwanti dan Nugroho (2011) Untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (human capital) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Upah Minimum

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Ricardo dalam Ismail (2016) mengemukakan teori upah alami (*natural wage)*, Upah alami adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami dipakai sebagai suatu acuan agar para pekerja paling sedikit memiliki upah untuk dapat

memenuhi kebutuhan hidup minimum layak (KHL) sehingga diharapkan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Apabila upah pasar (upah berlaku yang ditetapkan) lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat.

Hubungan Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Menurut Kaufman (2000), Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan. Menurut penyebabnya pengangguran dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengangguran Friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya perputaran dalam lingkup pekerjaan dan ketenagakerjaan.

2. Pengangguran siklis, yaitu pengangguran yang terjadi ketika permintaan lebih rendah dari output potensial perekonomian. Pengangguran siklis diukur melalui jumlah orang orang yang bekerja dikurnagi jumlah orang yang seharusnya mempunyai pekerjaan pada tingkat pendapatan potensial.

3. Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara angkatan kerja, berdasarkan pendidikan, kemampuan, jenis kelamin, pekerjaan, industri, keadaan geografis, informasi dan struktur permintaan tenaga kerja.

4. Pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan peralihan tenaga manusia yang digantikan oleh kinerja teknologi.

Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Menurut Todaro (1995) dalam Sholihati (2011) Terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan semi-pengangguran dan kemiskinan yang meluas dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Mereka yang bekerja tidak teratur atau hanya bekerja serabutan paruh waktu biasanya digolongkan di antara mereka yang berpenghasilan sangat miskin. Mereka yang bekerja dan dibayar secara teratur di sektor pemerintah maupun swasta termasuk kelompok berpenghasilan menengah atau atas.

Penelitian Terdahulu

Jonaidi (2012) melakukan penelitian terkait pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dengan judul “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yakni tingkat kemiskinan, pengangguran, investasi, harapan hidup, melek huruf, lama pendidikan, pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan yakni analisis deskriptif serta ekonometrika menggunakan model ekuasi simultan (*simultaneous equation models*) dengan metode two-stage least square (*Two-Stage Least Squares 2SLS)* menggunakan *Indirect Least Squares* (ILS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berkorelasi negatif pada tingkat kemiskinan dan lama pendidikan berkorelasi negatif pada tingkat kemiskinan di Indonesia.

Siregar dan Wahyuniarti (2008) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Variabel yang digunakan antara lain tingkat kemiskinan, PDRB pertanian, PDRB industri, inflasi, lulusan SMP, lulusan SMA, dan dummy krisis

ekonomi tahun 1995 sampai 2005 di 26 Provinsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif serta metode ekonometrika menggunakan analisis data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, laju populasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin, laju inflasi populasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Nugroho dan Purwanti (2011), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia". Adapun variabel yang digunakan yakni PDRB, agrishare , rata rata lama sekolah, angka melek huruf dan jumlah penduduk miskin. Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif serta ekonometrika regresi panel dengan model *Fixed Effect Models* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, ggrishare berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, rata rata lama sekolah berpengaruh negatif signifkan terhadap jumlah penduduk miskin dan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Sholihati (2011) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun 2009". Variabel yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Metode peneltian yang digunakan yakni metode deskriptif dan ekonometrika menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Istifaiyah (2015), melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila tahun 2009-2013)". Variabel yang digunakan yakni pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pengangguran terbuka dan tingkat Kemiskinan sedangkan metode penelitian yang digunakan yakni analisis deskriptif serta ekonometrika menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, lalu upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Gerbangkertasusila periode tahun 2009-2013.

Kerangka pikir

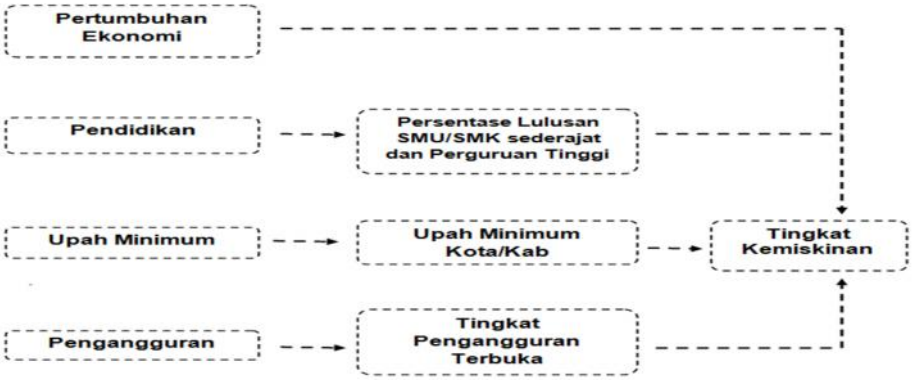

Sumber : Penulis, 2016.

3.METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pendekatan analisisnya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Alasan penggunaan metode penelitian ini karena fokus dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesa yang telah ditetapkan yaitu diduga ada pengaruh dari variabel pertumbuhan ekonomi, pendidikan, upah minimum dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur dengan 38 Kabupaten/Kota dimana data yang digunakan dalam penelitian ini mengambil kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk meperjelas dan mempermudah pemahaman terhadap variabel-variabel yang dianalisis dalam peneltian ini, maka dirumuskan definisi operasional variabel sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan (TK) yakni persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 yang diukur dalam satuan persen.

2. Pertumbuhan ekonomi (PE), dinyatakan sebagai perubahan PDRB atas dasar harga konstan di masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 yang diukur dalam satuan persen.

3 . Pendidikan (PD), yakni persentase kumulatif lulusan SMU,SMK dan perguruan tinggi sekolah yang dienyam penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2009-2013.

4. Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) yakni upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota yang diterima oleh pekerja per bulan.

5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni persentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan di masing masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2013 yang diukur dalam satuan persen.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sedangkan data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section.* Spesifikasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2009-2013 dengan jumlah observasi sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Sumber Data

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi dokumenter yakni pengumpulan suatu data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen terkait kemudian data tersebut dianalisis dengan perbandingan tinjauan pustaka teori dan penelitian yang telah ada yang di dapat dari literatur dan referensi berisi permasalahan yang diteliti baik dari publikasi.media elektronik dan referensi lain.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis panel data (*pooled data*) sebagai alat pengolahan data menggunakan program

Regresi Linier Berganda Untuk Data Panel

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis data panel menggunakan statistik linier berganda (multiple regression).

Metode Estimasi Model Regresi Data Panel

Pada analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan yag terdiri dari *pooled least square* (*commont effect*), pendekatan tetap (*fixed effect*) ,dan pendekatan efek acak (*random effect)*. Ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Model *Common Effect*

Model *Common Efect* menggabungkan data *cross section* dengan *time series* dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut (Widarjono, 2009).Model ini tidak dapat membedakan varians antara silang tempat dan titik waktu karena memiliki *intercept* yang tetap, dan bukan bervariasi secara random (Kuncoro, 2012)

2. Pendekatan Efek Tetap (fixed effect)

Pengertian model *fixed effect* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (cross section), tetapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati, 2012). Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2012).

3. Pendekatan Efek Acak (random effect)

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut Widarjono (2009) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian.

Uji Penentuan Model

Dalam regresi data panel,terdapat tiga uji yang dapat digunakan untuk penentuan model terbaik. Tiga uji itu yakni, Chow, Hausman test, dan Uji LM Effect

a. Chow Test.

Chow test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect (Widarjono, 2009). Hipotesis yang dibentuk dalam chow test adalah sebagai berikut :

H_0 : Model common effect

H_1 : Model fixed effect

H_0 ditolak jika P-value lebih kecil dari nilai α. Sebaliknya, H_0 diterima jika P-value lebih besar dari nilai α. Nilaiα yang digunakan sebesar 5 persen.

b. Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan dalam model regresi data panel (Gujarati, 2012). Hausman test dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut :

H_1 : Model fixed effects

H_2 : Model random effects

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol, maka digunakan statistic hausman dan membandingkannya dengan table chi square derajat bebas K. Statistik Hausman dirumuskan dengan :

$m = (\beta - b)'(M0 - M1)^{-1} (\beta - b) \sim x^2 (K)$

Dimana :

b = vektor untuk statistic variabel fixed effect

b = vektor statistic variabel random effect

M0 = matriks kovarians untuk dugaan model fixed effect

M1 = matriks kovarians untuk dugaan model random effect

Jika nilai m hasil pengujian lebih besar dari chi square tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol sehingga model yang lebih baik digunakan adalah model fixed effect begitu pula sebaliknya.

c . Lagrange Multiplier Effect Test

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (*df*) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Common Effect*, dan hipotesis alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah *Random Effect*. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Random Effect*. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai kritis *Chi-Squares* maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model *Common Effect*.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian data panel, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan dalam regresi linier berganda menggunakan OLS.Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Karena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Untuk uji normalitas tidak perlu dilakukan pada penelitian ini karena data yang digunakan bersifat sekunder dan persebaran datanya tidak ditentukan oleh peneliti. Autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) tidak perlu dilakukan. Dari uraian

tersebut, maka uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji heterekodestatisitas dan uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2007). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari korelasi antara variabel bebas. Pada umumnya jika koefisien korelasi kurang dari 0,90, variabel tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya (Ghozali, 2007).

Uji Heterokedastisitas

Menurut Santoso (2003) , suatu asumsi pokok dari model regresi linier yang baik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi harus homogen dan tidak terjadi heterokedastisitas yang artinya varians (ragam) dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dari variabel bebas yang diuji adalah sama. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji glejser.

Uji Statistik

Secara umum, uji statistic dalam analisis regresi adalah menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinasi (R^2)

Uji F

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Algifari,2000).

Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (terikat) (Ghozali,2005) dalam Sholihati (2011).

Uji R^2

Uji R^2 koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur berapa persentase yang dijelaskan variabel bebas atau independen (Y) terhadap variabel terikat atau dependen (X). Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$) jika nilai R^2 semakin besar mendekati 1 maka semakin baik dimana variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varibel dependen.

D. Hasil

Kondisi Geografis Lokasi Penelitian

Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, dipisahkan dengan daratan Jawa oleh Selat Madura. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung, dan Pulau Sempu. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten, dan 9 kota.

Keadaan Tingkat Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur

Tingkat penduduk miskin yang tinggi menggambarkan bahwa kinerja pembangunan suatu daerah masih belum optimal dan tepat sasaran sedangkan sebaliknya ketika tingkat penduduk miskin rendah maka menggambarkan bahwa kinerja pembangunan suatu daerah telah bergerak menuju kearah positif.

Tabel 4.1 Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	21,17	19,50	18,13	17,22	17,29
2	Kab. Ponorogo	16,62	13,22	12,29	11,72	11,76
3	Kab. Trenggalek	20,64	16,00	14,90	14,15	14,21
4	Kab. Tulungagung	12,41	10,64	9,90	9,37	9,40
5	Kab. Blitar	14,53	12,13	11,29	10,70	10,74
6	Kab. Kediri	18,85	15,52	14,44	13,66	13,71
7	Kab. Malang	15,08	12,54	11,67	11,00	11,04
8	Kab. Lumajang	18,17	13,98	13,01	12,36	12,40
9	Kab. Jember	17,74	13,27	12,44	11,76	11,81
10	Kab. Banyuwangi	13,91	11,25	10,47	9,93	9,97
11	Kab. Bondowoso	22,23	17,89	16,66	15,75	15,81
12	Kab. Situbondo	18,02	16,23	15,11	14,29	14,34
13	Kab. Probolinggo	30,13	25,22	23,48	22,14	22,22
14	Kab. Pasuruan	18,04	13,18	12,26	11,53	11,58
15	Kab. Sidoarjo	8,35	7,45	6,97	6,42	6,44
16	Kab. Mojokerto	14,61	12,23	11,38	10,67	10,71
17	Kab. Jombang	16,46	13,84	12,88	12,18	12,23
18	Kab. Nganjuk	19,77	14,91	13,88	13,17	13,22
19	Kab. Madiun	18,50	15,45	14,37	13,65	13,70
20	Kab. Magetan	15,67	12,94	12,01	11,45	11,50
21	Kab. Ngawi	20,86	18,26	16,74	15,94	15,99
22	Kab. Bojonegoro	23,87	18,78	17,47	16,60	16,66
23	Kab. Tuban	25,84	20,19	18,78	17,77	17,84
24	Kab. Lamongan	22,51	18,70	17,41	16,64	16,70
25	Kab. Gresik	21,43	16,42	15,33	14,29	14,35
26	Kab. Bangkalan	32,70	28,12	26,22	24,61	24,70
27	Kab. Sampang	34,53	32,47	30,21	27,87	27,97
28	Kab. Pamekasan	26,32	22,47	20,94	19,53	19,61
29	Kab. Sumenep	29,46	24,61	23,10	21,87	21,96
30	Kota Kediri	11,71	9,31	8,63	8,11	8,14
31	Kota Blitar	9,34	7,63	7,12	6,72	6,75
32	Kota Malang	7,22	5,90	5,50	5,19	5,21
33	Kota Probolinggo	23,29	19,03	17,74	18,33	10,92
34	Kota Pasuruan	11,20	9,00	8,39	7,87	7,90
35	Kota Mojokerto	8,88	7,41	6,89	6,46	6,48
36	Kota Madiun	6,69	6,11	5,66	5,35	5,37
37	Kota Surabaya	8,23	7,07	6,58	6,23	6,25
38	Kota Batu	6,18	5,08	4,74	4,45	4,47

Sumber : BPS Jatim, 2016

Keadaan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur meningkat pesat dan pada periode tahun 2009-2013 selalu diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini secara tersirat menyatakan bahwa pembangunan di Provinsi Jawa Timur menuju arah yang positif dan menuju optimal.

Di Provinsi Jawa Timur pertumbuhan ekonomi termasuk Indikator utama mengacu terhadap indikator yang tertuang dalam PP no.6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sembilan puluh empat indikator yang tertuang dalam PP no 6 tahun 2008,Jawa Timur merefleksikannya menjadi 5 (lima) Indikator Pembangunan Utama yakni : (1) Tingkat pengangguran terbuka , (2) Persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, (3) Pertumbuhan ekonomi, (4) Indeks Disparitas Wilayah, (5) Indeks Pembangunan Manusia.

Tabel 4.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	5,26	6,66	6,72	6,33	5,82
2	Kab. Ponorogo	5,01	5,89	6,41	5,98	5,17
3	Kab. Trenggalek	5,07	6,16	6,53	6,21	5,83
4	Kab. Tulungagung	5,21	6,65	6,88	6,47	6,03
5	Kab. Blitar	5,02	6,12	6,42	5,62	5,04
6	Kab. Kediri	4,47	6,07	6,28	6,37	5,72
7	Kab. Malang	5,02	6,57	7,35	6,77	5,60
8	Kab. Lumajang	5,05	5,94	6,35	6,00	5,53
9	Kab. Jember	5,07	6,16	7,21	5,83	5,27
10	Kab. Banyuwangi	5,39	6,26	7,14	7,24	6,48
11	Kab. Bondowoso	5,00	5,69	6,28	6,09	5,81
12	Kab. Situbondo	5,01	5,89	6,39	5,43	6,31
13	Kab. Probolinggo	5,17	6,25	6,33	6,44	5,32
14	Kab. Pasuruan	5,03	6,23	7,19	7,50	6,79
15	Kab. Sidoarjo	4,50	5,92	6,95	7,26	6,88
16	Kab. Mojokerto	5,04	6,87	7,23	7,26	6,48
17	Kab. Jombang	5,01	6,65	6,91	6,15	5,93
18	Kab. Nganjuk	5,34	6,32	6,47	5,85	5,54
19	Kab. Madiun	5,02	5,96	6,49	6,12	5,67
20	Kab. Magetan	5,01	5,81	6,18	5,79	5,82
21	Kab. Ngawi	5,10	6,19	6,20	6,63	6,63
22	Kab. Bojonegoro	6,19	10,97	9,20	3,77	2,25
23	Kab. Tuban	5,98	6,30	7,24	6,29	6,35
24	Kab. Lamongan	5,80	6,86	7,07	6,92	6,86
25	Kab. Gresik	5,55	6,89	7,39	6,92	6,03
26	Kab. Bangkalan	4,43	5,47	6,27	1,42	0,19
27	Kab. Sampang	4,22	5,40	6,14	5,77	6,52
28	Kab. Pamekasan	5,01	5,77	6,27	6,25	6,02
29	Kab. Sumenep	4,15	5,51	6,36	9,96	14,14
30	Kota Kediri	4,55	5,99	7,93	5,27	3,52
31	Kota Blitar	5,80	6,66	6,64	6,52	6,45
32	Kota Malang	4,53	6,60	7,22	6,26	6,18
33	Kota Probolinggo	5,06	6,41	6,67	6,49	6,47
34	Kota Pasuruan	5,01	5,99	6,35	6,31	6,49
35	Kota Mojokerto	5,04	6,66	6,77	6,09	6,19
36	Kota Madiun	5,72	6,97	7,29	6,83	7,68
37	Kota Surabaya	5,04	7,47	7,65	7,35	7,58
38	Kota Batu	6,25	7,16	8,17	7,26	7,28
Provinsi Jawa Timur		5,01	6,68	7,22	7,27	6,55

Sumber : BPS Jatim, 2016

Keadaan Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Todaro (2006) menyatakan bahwa untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya. Tingkat penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Hal ini menggambarkan seberapa baik kualitas pembangunan sumber daya manusia di suatu daerah. Di Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2013 persentase lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi masih berkisar di angka 26 persen dan relatif lebih kecil dibanding persentase lulusan sekolah formal jenjang dibawahnya. Dimana persentase lulusan dengan jenjang tertinggi dipegang oleh daerah kotamadya besar seperti Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Mojokerto, yang persentasenya berkisar rata rata diatas 30 persen per tahunnya. Sedangkan rata rata lulusan jenjang SMU dan perguruan tinggi terendah dipegang oleh beberapa kabupaten tertinggal seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Sumenep, Bondowoso, Situbondo yang berkisar dibawah 15 persen per tahunnya.

Tabel 4.3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	6,71	6,90	6,94	6,96	7,01
2	Kab. Ponorogo	6,61	6,68	6,99	7,18	7,49
3	Kab. Trenggalek	7,19	7,24	7,26	7,31	7,33
4	Kab. Tulungagung	7,80	7,84	7,85	7,95	7,79
5	Kab. Blitar	7,23	7,35	7,36	7,40	7,41
6	Kab. Kediri	7,59	7,60	7,69	7,72	7,75
7	Kab. Malang	6,80	6,80	7,02	7,08	7,08
8	Kab. Lumajang	6,03	6,10	6,41	6,43	6,52
9	Kab. Jember	6,45	6,53	6,73	6,79	6,80
10	Kab. Banyuwangi	6,81	6,85	6,89	7,25	7,25
11	Kab. Bondowoso	5,49	5,54	5,66	5,94	5,94
12	Kab. Situbondo	5,99	6,18	6,19	6,22	6,28
13	Kab. Probolinggo	5,08	5,57	5,80	5,92	6,31
14	Kab. Pasuruan	6,33	6,34	6,54	6,83	6,88
15	Kab. Sidoarjo	9,78	9,84	9,85	9,92	10,23
16	Kab. Mojokerto	7,79	7,81	7,82	7,94	8,22
17	Kab. Jombang	7,76	7,77	7,84	8,04	8,06
18	Kab. Nganjuk	7,11	7,19	7,44	7,61	7,62
19	Kab. Madiun	6,96	7,38	7,39	7,44	7,47
20	Kab. Magetan	7,55	7,57	7,60	7,85	7,86
21	Kab. Ngawi	6,34	6,36	6,99	7,02	7,06
22	Kab. Bojonegoro	6,53	6,66	6,68	6,72	6,72
23	Kab. Tuban	6,22	6,41	6,49	6,53	6,82
24	Kab. Lamongan	7,03	7,19	7,46	7,59	7,79
25	Kab. Gresik	8,49	8,53	8,84	8,98	9,00
26	Kab. Bangkalan	5,13	5,16	5,30	5,74	5,75
27	Kab. Sampang	3,93	3,95	4,20	4,22	4,39
28	Kab. Pamekasan	5,73	6,11	6,32	6,32	6,42
29	Kab. Sumenep	5,20	5,63	5,64	5,71	5,73
30	Kota Kediri	10,00	10,20	10,21	10,24	10,29
31	Kota Blitar	9,71	9,72	9,75	9,77	9,87
32	Kota Malang	10,82	10,83	10,84	10,87	10,89
33	Kota Probolinggo	8,35	8,52	8,53	8,67	8,79
34	Kota Pasuruan	8,81	8,85	8,96	9,05	9,07
35	Kota Mojokerto	9,67	9,97	9,98	10,11	10,12
36	Kota Madiun	10,38	10,43	10,44	10,46	10,54
37	Kota Surabaya	9,94	9,95	10,08	10,10	10,12
38	Kota Batu	8,34	8,51	8,52	8,54	8,76
Rata Rata Jawa Timur		7,20	7,24	7,34	7,45	7,53

Sumber : BPS Jatim, 2016

Tabel 4.4 Persentase Kumulatif Lulusan SMU,SMK sederajat dan Perguruan Tinggi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	12.46	15.87	15.17	13.6	15.54
2	Kab. Ponorogo	17.38	17.69	20.68	20.25	23.32
3	Kab. Trenggalek	15.2	16.12	14.3	16.77	15.92
4	Kab. Tulungagung	22.53	24.05	19.43	23.3	24.37
5	Kab. Blitar	16.95	18.33	17.23	17.7	17.26
6	Kab. Kediri	20	21.07	22.32	23.14	22.41
7	Kab. Malang	15.9	17.09	17.76	19.09	18.12
8	Kab. Lumajang	11.15	15.55	13.81	13.01	14.65
9	Kab. Jember	19.43	16.15	15.63	15.92	16.57
10	Kab. Banyuwangi	17.37	19.23	17.55	21.01	20.8
11	Kab. Bondowoso	11.82	11.14	13.65	14.82	13.03
12	Kab. Situbondo	18.03	11.81	14.38	15.46	16.16
13	Kab. Probolinggo	13.4	12.69	11.51	13.35	14.31
14	Kab. Pasuruan	18.07	14.7	16.08	18.27	18.19
15	Kab. Sidoarjo	44.1	40.87	43.27	43.93	49.15
16	Kab. Mojokerto	22.96	23.63	24.56	25.25	27.81
17	Kab. Jombang	24.11	23.15	23.2	25.24	24.86
18	Kab. Nganjuk	20.09	20.38	20.58	23.1	21.58
19	Kab. Madiun	23.46	22.05	21.75	23.06	23.96
20	Kab. Magetan	24.16	24.05	24.35	27.16	24.93
21	Kab. Ngawi	16.32	15.17	18.34	16.74	18.47
22	Kab. Bojonegoro	15.81	17.45	15.08	15.61	16.01
23	Kab. Tuban	14.79	15.12	14.23	15.62	17.12
24	Kab. Lamongan	20.88	20.56	22.41	23.1	24.69
25	Kab. Gresik	30.85	30.47	33.27	35.36	35.09
26	Kab. Bangkalan	11.5	8.77	10.38	11.67	11.79
27	Kab. Sampang	6.33	6.66	6.73	6.53	7.22
28	Kab. Pamekasan	14.69	15.73	16.14	15.29	18.89
29	Kab. Sumenep	13.68	12.6	10.47	12	12.77
30	Kota Kediri	44.43	40.16	44.94	44.61	45.81
31	Kota Blitar	39.55	40.61	42.5	39.42	45.62
32	Kota Malang	45.25	42.22	44	51.13	46.5
33	Kota Probolinggo	35.56	33.71	30.08	34.74	34.27
34	Kota Pasuruan	35.91	33.56	35.77	35.64	37.14
35	Kota Mojokerto	41.72	44.79	46.8	48.1	46.9
36	Kota Madiun	52.9	48.69	49.54	48.88	56.01
37	Kota Surabaya	46.24	45.23	46.04	45.71	47.32
38	Kota Batu	31.87	30.08	27.76	30.46	33.4
Rata Rata Jawa Timur		7.20	12.46	15.87	15.17	13.6

Sumber : BPS Jatim, 2016

Keadaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota ialah Upah Minimum yang pemberlakuannya dalam satu daerah Kabupaten atau Kota. Penetapan UMK dilakukan oleh Gubernur yang penetapan jumlahnya harus lebih besar dari upah minimum Provinsi, ditetapkan setiap satu tahun sekali, dan selambat-lambatnya dilakukan 40 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum atau 40 hari sebelum tanggal 1 Januari.

Keadaan Pengupahan di Provinsi Jawa Timur sangat dinamis dan berbeda di setiap daerah Kabupaten/Kota tergantung karakteristik sektor yang paling menonjol. Umumnya daerah Kabupaten/Kota dengan sektor industri yang kuat memiliki standar UMK yang lebih tinggi dibanding dengan daerah Kabupaten/Kota lain.

Tabel 4.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	600.000	630.000	705.000	750.000	887.250
2	Kab. Ponorogo	600.000	635.000	705.000	745.000	924.000
3	Kab. Trenggalek	600.000	635.000	710.000	760.000	903.900
4	Kab. Tulungagung	600.000	641.000	720.000	815.000	1.007.900
5	Kab. Blitar	570.000	663.000	750.000	820.000	946.850
6	Kab. Kediri	825.000	871.000	934.500	999.000	1.089.950
7	Kab. Malang	954.500	1.000.005	1.079.887	1.130.500	1.343.700
8	Kab. Lumajang	655.000	688.000	740.700	825.391	1.011.950
9	Kab. Jember	770.000	830.000	875.000	920.000	1.091.950
10	Kab. Banyuwangi	744.000	824.000	865.000	915.000	1.086.400
11	Kab. Bondowoso	620.000	668.000	735.000	800.000	946.000
12	Kab. Situbondo	610.000	660.000	733.000	802.500	1.048.000
13	Kab. Probolinggo	682.500	744.000	814.000	888.500	1.198.600
14	Kab. Pasuruan	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
15	Kab. Sidoarjo	955.000	1.005.000	1.107.000	1.252.000	1.720.000
16	Kab. Mojokerto	971.624	1.009.150	1.105.000	1.234.000	1.700.000
17	Kab. Jombang	752.500	790.000	866.500	978.200	1.200.000
18	Kab. Nganjuk	625.000	650.000	710.000	785.000	960.200
19	Kab. Madiun	645.000	660.000	720.000	775.000	960.750
20	Kab. Magetan	645.000	650.000	720.000	750.000	866.250
21	Kab. Ngawi	635.000	665.000	725.000	780.000	900.000
22	Kab. Bojonegoro	740.000	825.000	870.000	930.000	1.029.500
23	Kab. Tuban	798.000	870.000	935.000	970.000	1.144.400
24	Kab. Lamongan	760.000	875.000	900.000	950.000	1.075.700
25	Kab. Gresik	971.624	1.010.400	1.107.000	1.257.000	1.740.000
26	Kab. Bangkalan	715.000	755.000	850.000	885.000	983.800
27	Kab. Sampang	650.000	690.000	725.000	800.000	1.104.600
28	Kab. Pamekasan	750.000	900.000	785.000	975.000	1.059.600
29	Kab. Sumenep	690.000	730.000	785.000	825.000	965.000
30	Kota Kediri	856.000	906.000	975.000	1.037.500	1.128.400
31	Kota Blitar	572.500	663.000	737.000	815.000	946.850
32	Kota Malang	945.373	1.006.263	1.079.887	1.132.254	1.340.300
33	Kota Probolinggo	682.500	741.000	810.500	885.000	1.103.200
34	Kota Pasuruan	805.000	865.000	926.000	975.000	1.195.800
35	Kota Mojokerto	760.000	805.000	835.000	875.000	1.700.000
36	Kota Madiun	645.000	685.000	745.000	812.500	953.000
37	Kota Surabaya	948.500	1.031.500	1.115.000	1.257.000	1.740.000
38	Kota Batu	879.000	989.000	1.050.000	1.100.215	1.268.000

Sumber : BPS Jatim, 2016

Keadaan Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur

BPS 2013 mencatat bahwa Tingkat Penganguran Terbuka di Provinsi Jawa Timur relatif masih tinggi yakni sebesar 4,30 persen. Di Provinsi Jawa Timur, persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi lebih banyak terjadi di Kabupaten/Kota besar. Kabupaten/Kota besar di Jawa Timur seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo justru memiliki tingkat pengangguran terbuka diatas 4,30 persen atau diatas rata rata tingkat pengangguran terbuka provinsi Jawa Timur. Tercatat pada data BPS Jawa Timur pada tahun 2013, Kota Kediri menempati urutan pertama daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Jawa Timur yakni dengan persentase 8,00 persen lalu urutan kedua diduduki oleh Kota Malang dengan persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2013 mencapai 7,72 persen. Sedangkan daerah dengan persentase tingkat pengangguran terendah di Jawa Timur yakni Kabupaten Pacitan yang pada tahun 2013 tercatat persentase tingkat pengangguran terbuka mencapai 1,00 persen sedangkan peringkat kedua diduduki oleh Kabupaten Bondowoso dengan persentase 2,5 persen.

Tabel 4.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kab. Pacitan	1,32	0,87	2,70	1,16	1,00
2	Kab. Ponorogo	3,45	3,83	4,37	3,26	3,28
3	Kab. Trenggalek	3,91	2,15	3,18	3,14	4,12
4	Kab. Tulungagung	4,54	3,50	3,58	3,18	2,77
5	Kab. Blitar	3,00	2,24	3,61	2,86	3,74
6	Kab. Kediri	5,10	3,75	4,54	4,16	4,70
7	Kab. Malang	6,35	4,49	4,63	3,79	5,20
8	Kab. Lumajang	2,24	3,17	2,70	4,70	2,06
9	Kab. Jember	4,42	2,71	3,95	3,91	3,97
10	Kab. Banyuwangi	4,05	3,92	3,71	3,40	4,69
11	Kab. Bondowoso	2,88	1,59	2,84	3,75	2,05
12	Kab. Situbondo	2,28	3,13	4,74	3,31	3,07
13	Kab. Probolinggo	2,60	2,02	3,20	1,98	3,32
14	Kab. Pasuruan	5,03	3,49	4,83	6,43	4,35
15	Kab. Sidoarjo	10,19	8,35	4,75	5,21	4,13
16	Kab. Mojokerto	5,54	4,84	4,31	3,42	3,13
17	Kab. Jombang	6,19	5,27	4,24	6,69	5,60
18	Kab. Nganjuk	3,98	3,64	4,73	4,22	4,75
19	Kab. Madiun	6,04	5,55	3,37	4,16	4,70
20	Kab. Magetan	3,82	2,41	3,16	3,86	3,02
21	Kab. Ngawi	4,49	4,80	4,06	3,05	5,06
22	Kab. Bojonegoro	4,52	3,29	4,18	3,51	5,82
23	Kab. Tuban	4,22	2,86	4,15	4,25	4,33
24	Kab. Lamongan	4,92	3,62	4,40	4,98	5,00
25	Kab. Gresik	7,01	7,70	4,36	6,72	4,51
26	Kab. Bangkalan	5,01	5,79	3,91	5,32	6,84
27	Kab. Sampang	1,70	1,77	3,91	1,78	4,74
28	Kab. Pamekasan	2,18	3,53	2,89	2,30	2,19
29	Kab. Sumenep	2,27	1,89	3,71	1,19	2,55
30	Kota Kediri	8,32	7,39	4,93	7,85	8,00
31	Kota Blitar	8,47	6,66	4,20	3,55	6,22
32	Kota Malang	10,44	8,68	5,19	7,68	7,72
33	Kota Probolinggo	8,53	6,85	4,66	5,12	4,52
34	Kota Pasuruan	7,57	7,23	4,92	4,34	5,34
35	Kota Mojokerto	9,30	7,52	5,86	7,32	5,69
36	Kota Madiun	11,27	9,52	5,15	6,71	6,66
37	Kota Surabaya	8,63	6,84	5,15	5,07	5,28
38	Kota Batu	6,88	5,55	4,57	3,41	2,32

Sumber : BPS Jatim, 2016

Uji Asumsi Klasik

1. Asumsi Multikolinearitas

Pada umumnya jika koefisien korelasi kurang dari 0,90, variabel tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya (Ghozali, 2007:92).

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas

	PE	PD	TPT	UMK
PE	1	0.1402	0.3384	0.0301
PD	0.1402	1	0.2066	-0.0144
TPT	0.3384	0.2066	1	0.01358
UMK	0.0301	-0.0144	0.01358	1

Sumber : Penulis, 2016

Berdasarkan hasil pengujian model regresi diketahui bahwa korelasi antar variabel bebas bernilai lebih kecil dari 0,90 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas sehingga asumsi ini terpenuhi.

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi Model Regresi
PE	0,1568
PD	0,1714
UMK	0,8289
TPT	0,8593

Sumber : Penulis, 2016

Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan nilai signifikansi uji Glejser pada semua variabel bebas > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi panel tidak terdapat masalah heterokedastisitas dan asumsi ini terpenuhi.

Hasil Analisis Data

1. Pemilihan Model Regresi Panel

Tabel 4.9 Hasil Pemilihan Model Regresi Panel

Uji	Hipotesis	Nilai Sig	Kesimpulan
Lagrange Mutlipier Test	H1: *Common Effect Model* H1: *Random Effect Model*	0,0000	*Random Effect Model*
Redundant Fixed Effect Test (Uji Chow)	Ho: *Common Effect Model* H1: *Fixed Effect Model*	0,000	*Fixed Effect Model*
Correlated Random Effects – Hausman Test	Ho: *Random Effect Model* H1: *Fixed Effect Model*	0,0001	*Fixed Effect Model*

Sumber : Penulis, 2016

Dari hasil pemilihan model regresi panel, dapat dilihat bahwa pada *Lagrange Mutlipier Test* diperoleh nilai sig =0,000. Nilai tersebut < 0,05 sehingga sesuai kaidah yang telah ditentukan, diputuskan Tolak H_0. Artinya bahwa *Model Random Effect* lebih baik dari *Common Effect Model*. Selanjutnya untuk mengetahui mana antara model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* yang lebih baik, digunakan uji *Redundant Fixed Effect Test (Uji Chow)*. Dari hasil yang telah diperoleh, nilai sig menunjukkan < 0,05 sehingga diputuskan Tolak H_0 yang artinya bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Common Effect Model*. Untuk menentukan apakah *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling baik, maka digunakan *Correlated Random Effects – Hausman Test.* Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang cocok dengan data yang digunakan.

Hasil Uji Regresi Panel

Dependent Variable: TK?
Method: Pooled Least Squares
Date: 11/16/16 Time: 14:12
Sample: 2009 2013
Included observations: 5
Cross-sections included: 37
Total pool (balanced) observations: 185

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	136.0839	10.79764	12.60312	0.0000
PE?	-0.431339	0.108770	-3.965611	0.0001
PD?	-0.118143	0.084758	-1.393887	0.1655
UMK?	-8.886390	0.857907	-10.35822	0.0000
TPT?	0.000764	0.004841	0.157923	0.8747

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.948152	Mean dependent var	14.77557
Adjusted R-squared	0.933750	S.D. dependent var	6.226386
S.E. of regression	1.602618	Akaike info criterion	3.973855
Sum squared resid	369.8474	Schwarz criterion	4.687556
Log likelihood	-326.5816	Hannan-Quinn criter.	4.263100
F-statistic	65.83361	Durbin-Watson stat	1.475127
Prob(F-statistic)	0.000000		

Model regresi panel secara umum yang terbentuk adalah sebagai berikut:

TK = 136.0839– 0.431339PE – 0.118143 PD – 8.886390 UMK + 0,000764 TPT

Hasil Uji Signifikansi

1 . Uji Signifikansi Simultan

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut

H_0: β_i = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PE, PD, UMK dan TPT terhadap TK)

H_1: β_i ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PE, PD, UMK dan TPT terhadap TK)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah Tolak H_0 jika nilai nilai sig < 0,05 dan sebaliknya adalah Terima H_0 jika nilai nilai sig > 0,05. Berdasarkan hasil output regresi panel, diperoleh nilai sig F = 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu diputuskan Tolak H_0 yang artinya PE, PD, UMK dan TPT berpengaruh terhadap TK secara bersama-sama. Selanjutnya dilakukan pengujian signifikansi secara parsial (uji t) untuk mengetahui bagaimana pengaruh tiap variabel secara individu.

2. Uji Signifikansi Parsial

Tabel 4.10 Uji Signifikansi Parsial

Variabel Independen	B	t_{hitung}	Nilai p	Keterangan	TK
PE (X_1)	-0,431339	-3,965611	0,0001	Signifikan	95%
PD(X_2)	-0,118143	-1,393887	0,1655	Tidak Signifikan	95%
UMK(X_3)	-8,886390	-10,35822	0,0000	Signifikan	95%
TPT (X_4)	0,000764	0,157923	0,8747	Tidak Signifikan	95%

*** TK = tingkat kepercayaan**

Sumber : Penulis, 2016

1. Variabel PE (X_1)
Hipotesis uji yang digunakan adalah:

H_0 : $\beta_1 = 0$ (variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

H_1 : $\beta_1 \neq 0$ (variabel X_1 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh signifikansi sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari α=0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan PE (X_1)berpengaruh signifikan terhadap TK (Y) pada tingkat kepercayaan 95%. Nilai koefisien b_1 bernilai negatif -0,431339)sehingga dapat diartikan ketika PE meningkat 1% maka akan menurunkan TK sebesar 0,431339%.

2 . Variabel PD (X_2)
Hipotesis uji yang digunakan adalah:

H_0 : β_2= 0 (variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

H_1 : $\beta_2 \neq 0$ (variabel X_2 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Variabel PD (X_2) memiliki signifikansi sebesar 1,655 yang bernilai lebih besar daripada 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa PD (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap TK (Y).

3 . Variabel UMK (X_3)
Hipotesis uji yang digunakan adalah:

H_0 : $\beta_3 = 0$ (variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

H_1 : $\beta_3 \neq 0$ (variabel X_3 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Variabel UMK (X_3) memiliki signifikansi sebesar 0,0000 yang bernilai lebih kecil daripada 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa UMK (X_3) berpengaruh signifikan terhadap TK (Y). . Nilai koefisien -8,886390 yang bernilai negatif memiliki pengertian bahwa jika variabel UMK meningkat 1% maka TK akan menurun sebesar 8.886390 persen.

4 . Variabel TPT (X_4)
Hipotesis uji yang digunakan adalah:

H_0 : $\beta_4 = 0$ (variabel X_4 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y)

H_1 : $\beta_4 \neq 0$ (variabel X_4 berpengaruh signifikan terhadap Y)

Variabel TPT (X_4) memiliki signifikansi sebesar 0,8747 yang bernilai lebih besar daripada 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima sehingga disimpulkan bahwa TPT (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap TK (Y).

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi diperoleh nilai R^2sebesar 0,927. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 92,7 %, sedangkan 7,3 % lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini.

Pembahasan Hasil Estimasi dan Analisis Data

Berdasarkan hasil pengujian model regresi diketahui bahwa korelasi antar variabel bebas bernilai lebih kecil dari 0,90 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan linier antar variabel bebas sehingga asumsi terbebas dari multikolinearitas terpenuhi.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedatisitas, didapatkan nilai signifikansi uji Glejser pada semua variabel bebas > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi panel tidak terdapat masalah heterokedastisitas

Setelah uji asumsi klasik, maka dilakukan analisis untuk pemilihan model terbaik. pada *Lagrange Mutlipier Test* diperoleh nilai sig =0,000. Nilai tersebut < 0,05 sehingga sesuai kaidah yang telah ditentukan, diputuskan Tolak H_0. Artinya bahwa *Model Random Effect* lebih baik dari *Common Effect Model*. Selanjutnya untuk mengetahui mana antara model *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model* yang lebih baik, digunakan uji *Redundant Fixed Effect Test (Uji Chow)*. Dari hasil yang telah diperoleh, nilai sig menunjukkan < 0,05 sehingga diputuskan Tolak H_0 yang artinya bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik dari *Common Effect Model*. Untuk menentukan apakah *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling baik, maka digunakan *Correlated Random Effects – Hausman Test.* Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig < 0,05 sehingga disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* adalah model yang cocok dengan data yang digunakan. Dalam FEM digunakan konstanta dari masing-masing kota untuk menggambarkan karakter dari masing-masing daerah yang diamati.

Dari regresi panel dengan *Fixed Effect Model* untuk memprediksi besarnya hubungan antara variabel dependen yaitu TK dengan variabel independen yaitu PE, PD, UMK dan TPT didapatkan model persamaan sebagai berikut : TK = 136.0839– 0.431339PE – 0.118143 PD – 8.886390 UMK + 0,000764 TPT

Hasil pengujian signifikansi dalam uji simultan mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan secara bersama-sama di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dalam uji secara parsial hanya Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum yang berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan sedangkan variabel pendidikan meskipun berpengaruh negatif terhadap

kemiskinan namun nilainya tidak signifikan sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif namun nilainya tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa model yang digunakan memiliki hasil koefisien determinasi atau nilai R^2 sebesar 0,948. Hasil tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari variabel-variabel bebas dalam mempengaruhi variabel Y adalah sebesar 94,8 %, sedangkan 5,2 % lainnya disumbangkan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan ini.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan diProvinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel pertumbuhan ekonomi (PE) adalah 0,431339 yang artinya apabila variabel pertumbuhan ekonomi bertambah 1 persen maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan (TK) sebesar 0,419829. Tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel pertumbuhan ekonomi (PE) terhadap tingkat kemiskinan (TK)

Dari hasil tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan pendapat Todaro (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur menurun. Dalam penelitian terdahulu oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008) pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan jumlah kemiskinan yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel pendidikan (PD) dengan menggunakan data persentase kumulatif lulusan SMU,SMK dan perguruan tinggi Kabupaten Kota di Jawa Timur adalah 0,118143 yang artinya apabila variabel pendidikan bertambah 1 persen maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan (TK) sebesar 0,118143. Tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel pendidikan (PD) terhadap tingkat kemiskinan (TK). Namun dikarenakan memiliki signifikansi sebesar 0,1655 yang bernilai lebih besar daripada 0,05 maka pengaruhnya tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, pada hasil koefisien regresi variabel pendidikan (PD) menggunakan data persentase rata rata lama sekolah adalah 6,589203 yang artinya apabila variabel pendidikan bertambah 1 persen maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan (TK) sebesar 6,589203. Tanda negatif (-) menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara variabel pendidikan (PD) terhadap tingkat kemiskinan (TK), (lihat pada lampiran), yang berarti variabel (PD) berpengaruh signifikan.

Dalam penelitian ini, hasil koefisien regresi variabel pendidikan (PD) yang diambil menggunakan data persentase kumulatif lulusan SMU,SMK dan perguruan tinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hal ini didasari alasan bahwa persentase kumulatif lulusan SMU,SMK dan perguruan tinggi Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada penelitian ini dianggap lebih relevan dan lebih bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya pendidikan di Provinsi Jawa Timur dalam kaitannya terhadap variabel kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Persentase kumulatif lulusan SMU/SMK sederajat dan perguruan tinggi dapat menggambarkan persentase kualitas SDM yang ada. Sedangkan data persentase rata rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dianggap kurang relevan dikarenakan kurang bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya pendidikan dalam kaitannya terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Data rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Timur periode tahun 2009-2013 menunjukkan bahwa tidak ada satu pun daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan rata rata lama sekolah mencapai standar pendidikan wajib belajar 12 tahun atau setingkat minimal SMU/SMK sederajat. Hal ini sangat tidak relevan jika mengingat bahwa pada saat ini

kualifikasi pendidikan untuk mendapat pekerjaan dengan upah layak (UMK) hampir semuanya atau mayoritas mensyaratkan pendidikan minimal jenjang SMU/SMK sederajat.

Menurut Todaro (2006) untuk memperoleh pekerjaan yang ditawarkan di sektor modern didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang dan tingkat penghasilan yang dimiliki selama hidup berkorelasi positif terhadap tingkat pendidikannya.

Persentase lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi merupakan salah satu indikator penting pendidikan yang menggambarkan bagaimana tingkat pendidikan di suatu daerah tercapai, walau pada faktanya jenjang pendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi kontribusinya masih relatif rendah terhadap keseluruhan lulusan jenjang pendidikan formal lain di Provinsi Jawa Timur namun kontribusi lulusan SMU sederajat dan perguruan tinggi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan meski dalam penelitian ini pengaruhnya tidak signifikan. Tidak signifikannya pengaruh lulusan sekolah jenjang SMU sederajat dan perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur terhadap penurunan tingkat kemiskinan bisa disebabkan karena masih minimnya lapangan kerja di Jawa Timur yang tersedia untuk kualifikasi lulusan sekolah formal terutama perguruan tinggi, sehingga lulusan perguruan tinggi tidak serta merta langsung mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak sesuai kualifikasinya.

Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki signifikansi sebesar yang bernilai lebih besar daripada 0,0000 yang berarti UMK (X_3) berpengaruh signifikan terhadap TK (Y). Nilai koefisien b_3 8,886390 yang bernilai negatif memiliki pengertian bahwa jika variabel UMK meningkat 1% maka TK akan menurun sebesar 8,886390 %.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan hal tersebut sesuai dengan pendapat Kaufman (2000), Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan..

Sesuai dengan Ricardo dalam Ismail (2016) yang juga mengemukakan teori upah alami (*natural wage)*, dimana upah alami adalah upah yang besarnya tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami dipakai sebagai suatu acuan agar para pekerja paling sedikit memiliki upah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum layak (KHL) sehingga diharapkan para pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. Apabila upah pasar (upah berlaku yang ditetapkan) lebih tinggi dari upah alami, maka kemakmuran akan meningkat.

Menurut Febrianica (2015) kenaikan upah minimum dapat memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Seperti dalam pendekatan model kompetitif dijelaskan bahwa kenaikan upah minimum yang selalu terjadi setiap tahun serta kenaikannya yang berada di tingkat keseimbangan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan, dimana kenaikan upah minimum ini akan mendorong terjadinya peningkatan penawaran tenaga kerja dan pengurangan penyerapan tenaga kerja

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013

Nilai koefisien regresi pada variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah 0,000744 yang artinya apabila variabel tingkat pengangguran terbuka bertambah 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan (TK) sebesar 0,000744. Tanda positif (+) menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan (TK) namun

Variabel TPT memiliki signifikansi sebesar 0,8649 yang bernilai lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap TK.

Todaro (1995) dalam Sholihati (2011) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran yang tinggi dengan semi-pengangguran dan kemiskinan yang meluas dengan distribusi pendapatan yang tidak merata. Mereka yang bekerja tidak teratur atau hanya bekerja serabutan paruh waktu biasanya digolongkan di antara mereka yang berpenghasilan sangat miskin. Mereka yang bekerja dan dibayar secara teratur di sektor pemerintah maupun swasta termasuk kelompok berpenghasilan menengah atau atas. Todaro (1995) dalam Sholihati (2011) juga memberi catatan bahwa kita akan keliru bila berasumsi bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin sedangkan mereka yang bekerja paruh waktu relatif mempunyai penghasilan yang cukup baik, ini sesuai dari hasil koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menggambarkan bahwa memang TPT berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan namun dalam penelitian ini pengaruh tersebut tidak signifikan yang menggambarkan bahwa penganggur terbuka tidak semua atau tidak selalu berkorelasi kuat terhadap kemiskinan dan persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur juga tidak memberikan dampak berarti terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Karakteristik sektor usaha dan pekerja yang majemuk di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu alasan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Daerah daerah dengan persentase kemiskinan tinggi seperti daerah Kabupaten di Madura, wilayah Tapal Kuda dan Jawa Timur bagian Selatan umumnya justru memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibanding dengan daerah Kabupaten/Kota Besar di Jawa Timur. Karakteristik pekerja di Kabupaten/Kota besar di Jawa Timur yang mayoritas cenderung bekerja pada sektor formal memberikan akses terhadap penghasilan yang layak, selain itu dengan *human capital* berupa tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi mampu mendorong untuk masyarakat mencari akses panghasilan layak tanpa masuk dunia kerja. Hal ini berbanding terbalik terhadap daerah dengan persentase kemiskinan yang tinggi namun tingkat pengangguran rendah dimana sektor usaha kecil menengah informal serta *low skilled labour* yang notabene penghasilannya relatif minim dan kurang mencukupi kebutuhan hidup layak justru mendominasi dan masyarakat pun sangat bergantung pada sektor usaha tersebut. Selain itu pada daerah kabupaten tempat kantong-kantong kemiskinan terjadi di Jawa Timur, umumnya masyarakat pada usia produktif cenderung untuk melakukan urbanisasi menuju kota yang menawarkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih menjanjikan dari daerah asal mereka. Hal ini secara tidak langsung mengurangi beban penyerapan angkatan kerja di daerah sehingga tingkat pengangguran terbuka di daerah Kabupaten miskin di Jawa Timur pun cenderung lebih sedikit dibanding daerah Kabupaten/Kota yang lebih maju di Jawa Timur.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013. Hal ini sesuai pendapat Todaro (2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur menurun. Pertumbuhan ekonomi yang baik dan terdistribusi merata akan memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan yang menurun.

Pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan namun dalam di Provinsi Jawa Timur 2009-2013. Meskipun tidak signifikan, namun hasil ini sesuai dengan pendapat Sharp et al (2000) dimana penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya

kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan, Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya penghasilannya rendah. Sebagai salah satu modal manusia (*human*

capital), pendidikan adalah faktor yang sangat penting dimana dengan pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang bisa digunakan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya secara layak dan menghindari kemiskinan.

Upah minimum Kabupaten/Kota berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2009-2013. Upah minimum yang setiap tahunnya meningkat dan disesuaikan agar minimal memenuhi standar kebutuhan hidup layak telah menjadi suatu instrumen kebijakan pemerintah untuk menghindarkan pekerja dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan yang terdapat yang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 bahwa tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.

Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan namun dalam penelitian ini pengaruh tersebut tidak signifikan yang menggambarkan bahwa penganggur terbuka tidak semua atau tidak selalu berkorelasi kuat terhadap kemiskinan dan persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur juga tidak memberikan dampak berarti terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini sesuai degan pendapat Todaro (1995) dalam Sholihati (2011) bahwa kita akan keliru bila berasumsi bahwa setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin sedangkan mereka yang bekerja paruh waktu relatif mempunyai penghasilan yang cukup baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu agar menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif dan stabil dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi terus stabil dan meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus membuat dan mengaplikasikan kebijakan yang mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur ke daerah daerah sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi terpusat pada kabupaten/kota besar di Jawa Timur. Selain itu pemerintah perlu menciptakan program kebijakan khusus seperti membentuk badan yang khusus mendukung pengembangan usaha sektor mikro kecil dan menengah baik formal maupun informal sebagai salah satu pilar perekonomian utama Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu agar terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendukung penuh program wajib belajar nasional 9 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat, dan berinisiatif meningkatkannya menjadi 12 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa timur juga perlu agar menciptakan kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan lebih besar yang mendorong meningkatnya kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur dari sekolah formal tingkat dasar hingga perguruan tinggi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu terus konsisten memberlakukan upah minimum Kabupaten/Kota dan mengkomunikasikannya secara lebih baik dengan pihak *stakeholder* terkait yakni pengusaha maupun pekerja dengan cara membentuk suatu forum diskusi formal resmi yang secara khusus membahas masalah pengupahan sehingga bisa dicari titik temu yang dapat mempertemukan kepentingan kedua belah pihak secara baik. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu lebih tegas dalam implementasi penegakkan penerapan upah minimum dengan memberikan sanksi keras terhadap perusahaan yang melanggar aturan upah minimum Kabupaten/Kota agar kesejahteraan pekerja terjaga dan terhidar dari kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menciptakan kebijakan maupun insentif yang mendorong terciptanya lapangan kerja terutama yang padat karya seperti kebijakan kredit untuk sektor mikro padat karya dengan bunga lebih rendah melalui kerjasama dengan lebih intensif bersama institusi perbankan, koperasi maupun institusi kelembagaan terkait sebagai penyalur kredit, serta menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja seperti memperbanyak dan meningkatkan

kualitas fasilitas pelatihan kerja (BLK) maupun institusi pendidikan sekolah formal berorientasi ketenagakerjaan seperti sekolah menengah kejuruan (SMK).

D. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Alfian Dkk. (ed.), 1980. *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Ilmu Sosial dan HIPIS.

Algifari. 2000. *Analisis Regresi, Edisi Kedua*, Yogyakarta : BPFE

Amartya Sen, Bloom and Canning, 2001. *The Health and Proverty of Nations : From Theory to Practice, School of Public Health, Harvard University*. Belfast: Boston and Dept. of Economics,Queens University.

Arsyad, Lincolin, 1999. Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta. STIE YKPN.

BKKBN. 2015. *Data Survei Angkatan Kerja Indonesia 2006-2013*. Jakarta.

Boediono. 1985. *Pengantar Ilmu Ekonomi No 2 Ekonomi Makro Edisi 4*. Yogyakarta : BPFE.

BPS. 2015. *Data Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi 2009-2013*. Jakarta.

BPS. 2015. *Data Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi 2009-2013*. Jakarta.

BPS Jawa Timur. 2010. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Timur 2009*. Jawa Timur

BPS Jawa Timur. 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Timur 2010*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2012. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Timur 2011*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2013. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Timur 2012*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2014. *Data dan Infromasi Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Timur 2013*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2015. *Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2010. *Laporan Eksekutif Angkatan Kerja di Jawa Timur 2008-2009*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2012. *Laporan Eksekutif Angkatan Kerja di JawaTimur 2010-2011*. Jawa Timur

BPS Jawa Timur. 2014. Laporan *Eksekutif Angkatan Kerja di JawaTimur 2012-2013*. Jawa Timur

BPS Jawa Timur. 2010. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Jawa Timur 2005-2009*. Jawa Timur.

BPS Jawa Timur. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kota di Jawa Timur 2010-2014*. Jawa Timur.

Damodar N. *Gujarati* and Dawn C. Porter. *2012. Dasar–dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat

Disnakertransduk Jawa Timur. 2015. *Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Timur 2009-2013*. Jawa Timur

Dumairy, 1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta :Penerbit Erlangga.

Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi DasarTeori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES

Febrianica, Danny Nur. 2015. *Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Malang :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Ghozali, Imam. *2006. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program. SPSS"*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. New York : McGrawHill Companies.

Hsaio, C. 2003. *Analysis of panel data*. Cambridge University Press. New York.

Istifaiyah, Lailatul. 2015. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Gerbangkertasusila tahun 2009-2013)*. Malang :Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Jonaidi, Arius. 2012. Analisis *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi Vol. 1, (No.1).

Kaufman & Hotchkiss. 1999. *The Economics of Labour Markets, Fifth Edition*. The Dryden Press.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, dan 20.

Kuncoro, Mudrajad.1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta :UPP AMD YKPN.

Makmun. 2003. *Gambaran Kemiskinan dan Action Plan Penanganannya.Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan,* Vol.7(2).

Nasikun. 2000. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Grafindo

Nugroho, Widiatma dan Evi Yulia Purwanti. 2011. *Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Angka Melek Huruf Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*. Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 188 tahun 2008 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009. [Online] Tersedia :http://www.jatimprov.go.id.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 69 tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2010. [Online] Tersedia : http://www.jatimprov.go.id.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 93 tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2011. [Online] Tersedia : http://www.jatimprov.go.id.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 81 tahun 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2012. [Online] Tersedia : http://www.jatimprov.go.id.

Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 72 tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten Kota di Jawa Timur tahun 2013. [Online] Tersedia : http://www.jatimprov.go.id.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. [Online] Tersedia : https://portal.mahkamahkonstitusi.go.id

Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008. [Online] Tersedia : http://www.bpkp.go.id.

Rostow, W.W, I960. *The Stage of Economic Growth*, Cambridge : Cambridge University Press.

Sukirno, Sadono. 2003. *Pengantar Teori Mikroekonomi (Edisi Ketiga)*. Grafindo. Jakarta.

Samuelson, Paul A.; William D Nordhaus. 2004. Economics, An Introductory Analysis.USA :McGraw-Hill

Santoso, Singgih. 2003. *Statistik deskriptif: konsep aplikasi dan aplikasi dengan MS excel dan SPSS*. Yogyakarta

Sharp et al. 2000. *Economics of Social Issues 14th edition*, New York: Irwin/*McGraw-Hill*.

Sholihati, Ika Rizkiana. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Timur Tahun 2009*. Malang :Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Simandjuntak. Payaman. 1998. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: FEUI.

Siregar, Hermanto dan Dwi Wahyuniarti, 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.* Bogor :Institut Pertanian Bogor.

Soedjatmoko, 1984. Dimensi Manusia Dalam Pembangunan. Jakarta : LPSES.
Soemardjan, Selo. 1997 .*Kemiskinan :Suatu Pandangan Sosiologi*. Jakarta : Jurnal *Sosiologi* Indonesia.

Spicker, Paul. 2002. *Poverty and The Welfare State : Dispelling The Myths*. London A Catalyst Working Paper.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif,* dan R & D. Bandung : Alfabeta

Supriatna, Tjahya, 1997, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Bandung :Humaniora Utama Press.

Todaro M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta :Penerbit Erlangga.

Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan.

Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. 3rd*. Yogyakarta : Ekonesia

Wiguna, V.I, 2013. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010.* Malang : Universitas Brawijaya

Zainudin, Ismail dan Priyono. 2016. *Teori Ekonomi*. Sidoarjo : Zifatama.